

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Taiwan dan Tiongkok memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam hubungan antara keduanya. Sejak awal abad ke-20, Taiwan telah menjadi bagian dari Republik Tiongkok, sedangkan Tiongkok telah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Perbedaan politik dan ideologi antara kedua negara telah menyebabkan konflik yang berkelanjutan. Pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengambil alih kekuasaan di Tiongkok, dan Taiwan menjadi sebuah negara yang terisolasi dan berada di bawah kekuasaan Partai Nasionalis Kuo Min Tang (KMT).

Pada awalnya, Taiwan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tiongkok, terutama selama masa pemerintahan Presiden Ma Ying Jeou. Bahkan pada tahun 2010, Taiwan menandatangani *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) dengan Tiongkok sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan meningkatkan status Taiwan di dunia internasional. Namun, perubahan kebijakan luar negeri Taiwan mulai terjadi ketika Presiden Tsai Ing-wen menggantikan Ma Ying-jeou pada tahun 2016. Tsai Ing Wen memutuskan untuk mengubah orientasi kebijakan luar negeri Taiwan dari "*Pro China*" ke "*New Southward*" yang lebih inklusif dan berorientasi pada kerja sama dengan negara-negara lain di Asia dan dunia internasional.

Pro China yang dimaksud dalam konteks kebijakan luar negeri Taiwan merujuk pada kebijakan yang mendukung dan memperkuat hubungan dengan Tiongkok. Kebijakan ini dilakukan oleh Presiden Ma Ying Jeou, yang berusaha

untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik dengan Tiongkok. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan status Taiwan di dunia internasional dan meningkatkan investasi Tiongkok di Taiwan (Romualdi & Rochmat, 2023).

Sebaliknya, *New Southward* adalah kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Taiwan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kerja sama dengan negara-negara lain di Asia dan dunia internasional. Kebijakan ini dilakukan oleh Presiden Tsai Ing Wen, yang berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina, serta meningkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN dan APEC. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan status Taiwan di dunia internasional dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain di Asia dan dunia (Romualdi & Rochmat, 2023).

Perubahan kebijakan luarnegeri Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward* dapat dilihat dalam peningkatan kerja sama Taiwan dengan negara-negara lain di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Taiwan juga meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Selain itu, Taiwan juga meningkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN dan APEC.

Pada awal tahun 2000-an, Taiwan mulai bergerak menuju kemerdekaan dengan nama "Taiwan" dan meningkatkan interaksi dengan negara-negara lain. Tiongkok, sebaliknya, terus mempertahankan klaimnya terhadap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Pada tahun 2016, Taiwan memutuskan untuk

meningkatkan interaksi dengan negara-negara lain dan meningkatkan kebijakan luar negeri yang lebih independen. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan politik di Taiwan, di mana Partai Progresif Demokrat (DPP) menggantikan Partai KMT sebagai pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah meningkatkan interaksi dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta meningkatkan kebijakan luar negeri yang lebih independen (Pashya, 2022).

Pada tahun yang sama, Tiongkok mulai meningkatkan kepentingan nasionalnya terhadap Taiwan dengan tujuan untuk mengintegrasikan Taiwan ke dalam Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok juga meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Taiwan, termasuk dengan menghentikan hubungan diplomatik dengan beberapa negara yang masih menjalin hubungan dengan Taiwan. Namun, pada 2020, Taiwan mulai meningkatkan orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah Asia Timur. Taiwan juga meningkatkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara yang masih menjalin hubungan dengan Taiwan, termasuk dengan mengembangkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara di Afrika dan Asia Tenggara (Reuters, 2024).

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward* (2016 – 2023). Penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan, termasuk kepentingan nasional Taiwan, tekanan diplomatik dan ekonomi Tiongkok, serta hubungan diplomatik Taiwan

dengan beberapa negara di kawasan. Penulis menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang relevan, yaitu teori kebijakan luar negeri Charles Hermann. Untuk memperkuat analisis, penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional, dan konsep demokratisasi. Penulis juga menggunakan data empiris yang diperoleh dari beberapa sumber, termasuk laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan media massa untuk mendukung penelitian ini.

Politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kondisi internasional serta politik domestik negara tersebut. Politik domestik suatu negara berperan besar dalam penentuan arah kebijakan luar negerinya, termasuk Taiwan. Dalam hal ini, kondisi internasional merupakan faktor eksternal pendorong perubahan orientasi kebijakan luar negeri dan politik domestik merupakan bagian dari faktor internal. Faktor internal sendiri dapat meliputi elit politik yang berkuasa, birokrasi, dan masyarakat (Kusumawardhana, 2021, 126-131). Dalam hal perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok, penulis berargumen bahwa terdapat faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi faktor pendorong perubahan tersebut. Menurut penulis, dikeluarkannya Taiwan dari PBB pada 1971 kurang cukup untuk menjelaskan mengapa Taiwan mengubah orientasi politik luar negerinya terhadap Tiongkok dari *Pro China* menjadi *New Southward* karena belum dapat mengakomodir kondisi dan peran politik domestik.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis akan meneliti tentang “Mengapa Taiwan melakukan perubahan orientasi kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dinamika pembentukan dan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan.
2. Untuk memahami faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya fenomena perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan dari *Pro China* ke *New Southward*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan studi HI terkait motif dibalik perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok. Untuk pihak Taiwan, penelitian ini bermanfaat sebagai review terhadap dampak dari keputusan untuk mengubah orientasi kebijakan luar negeri dari *Pro China* ke *New Southward*.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. *State of the art*

Dalam penelitian terdahulu oleh Nathan, A. J., & Ross, R. S. (1998) yang berjudul "*The Great Wall and the Empty Fortress: China's Search for Security*" menganalisis bahwa perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terlihat dengan semakin gencarnya Taiwan dalam melakukan diplomasi publik dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai yang sama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa

Barat. Taiwan juga memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara yang dianggap sebagai sekutu, seperti Australia dan Selandia Baru. Menurut penulis, faktor demokrasi berpengaruh karena menekankan pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai liberal yang dipegang oleh negara-negara demokratis lainnya (Ross & Nathan, 1998).

Lalu dalam literatur oleh Euis Wahyuningsih (2020) dengan judul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Taiwan Melalui Kerja Sama Dengan China Dalam Kesepakatan ECFA Periode 2010-2014” menganalisis alasan dibalik keputusan Taiwan untuk menandatangani perjanjian kerja sama ECFA dengan China. Padahal hubungan kedua negara tersebut bukan merupakan suatu hubungan yang harmonis, setidaknya dalam 50 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Taiwan di bawah kepemimpinan Ma Ying-Jeou terjadi karena adanya kepentingan nasional Taiwan dalam menjalin kerja sama dengan China melalui organisasi internasional. Dengan terjalinnya kerja sama maka Taiwan akan mendapatkan keuntungan ekonomi bagi Taiwan sehingga kesejahteraan ekonomi dapat terwujud, selain itu konflik-konflik antara Taiwan dengan China akan dapat terselesaikan (Wahyuningsih, 2020).

Kemudian dalam penelitian terdahulu oleh Wu, J. Y. (2001) yang berjudul “*Taiwan's democratization: Forces behind the new momentum*” menjelaskan bahwa proses demokratisasi di Taiwan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan internasional dan kepentingan domestik.

Menurut Wu, meskipun tekanan internasional dan pengaruh global memainkan peran penting dalam mempercepat proses demokratisasi Taiwan, faktor domestik seperti gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil juga memainkan peran kunci dalam memperjuangkan hak politik dan menciptakan tatanan politik yang lebih demokratis (Wu, 1995, 361-387).

Dalam penelitian terdahulu oleh Sheryn Lee (2011) dengan judul *“The Defining Divide: Cross-Strait Relations and US, Taiwan, China Strategic Dynamics”* menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok telah mengalami perubahan karena konsepsi identitas domestik yang terus berkembang dan dinamika hubungan lintas selat atau cross-strait yang kompleks. Peran Amerika Serikat dalam konteks ini dianalisis dalam hal tujuan, keyakinan yang saling bertentangan, dan ambiguitas strategis. Artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan terbaru, seperti kembalinya kekuasaan kepada Kuomintang (KMT) dan mencairnya ketegangan politik antara Beijing dan Taipei, berpotensi membuka jalan bagi penyelesaian status politik Taiwan dan melonggarkan dilema keamanan lintas selat bagi Amerika Serikat (Lee, 2011).

Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu yang berjudul *“Politik Luar Negeri Taiwan Terhadap China Di Bawah Kepemimpinan Ma Ying Jeou (2008-2012)”* oleh Tamara (2020) mengkaji kebijakan luar negeri Taiwan di bawah kepemimpinan Ma Ying Jeou, dari tahun 2008-2012, dengan fokus pada upayanya untuk membangun hubungan damai dengan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan

data sekunder dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Ma Ying Jeou diterima dengan baik oleh Tiongkok, dengan inisiatif seperti kebijakan Tiga Tidak, pembukaan kembali dialog, kerja sama ekonomi, dan penegasan kembali konsensus 1992. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ma Ying Jeou berhasil mencapai tujuannya untuk membangun hubungan damai dengan Tiongkok, yang dibuktikan dengan peningkatan kerja sama dan berkurangnya konflik di antara kedua negara (Tamara, 2020).

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah disebutkan, belum ada yang secara spesifik menjelaskan dan menguraikan keseluruhan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh dalam perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong Taiwan mengubah orientasi kebijakan luar negerinya dari *Pro China* ke *New Southward* pada tahun 2015 hingga sekarang.

Penelitian ini berusaha menjelaskan perubahan perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok tahun 2016 - 2023. Dengan menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward*, penelitian ini akan membuktikan bahwa Taiwan pada akhirnya tetap memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Tiongkok.

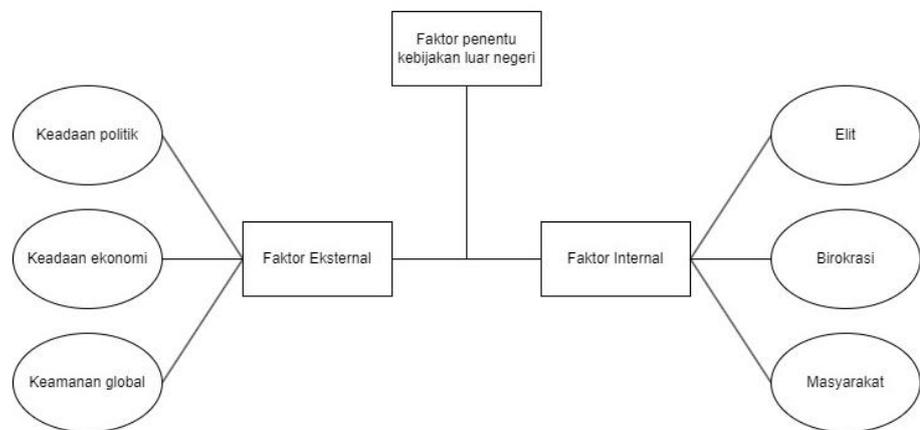
Kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas hanya menyatakan bahwa hubungan antara Taiwan dan Tiongkok bersifat

konflikual tetapi belum dapat menjelaskan adanya ketergantungan antara kedua negara. Penelitian ini berguna untuk melihat hubungan Taiwan - Tiongkok dalam kerangka ketergantungan sehingga dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok pada 2016 - 2023.

1.5.2. Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori Kebijakan Luar Negeri Charles Hermann merupakan suatu kerangka analisis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Teori ini dikembangkan oleh Charles Hermann, seorang ilmuwan politik terkemuka yang mengkhususkan diri dalam studi kebijakan luar negeri. Menurut Hermann, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang bersifat domestik. Faktor eksternal mencakup lingkungan internasional, seperti keadaan politik, ekonomi, dan keamanan global, serta interaksi dengan negara-negara lain. Hermann menekankan pentingnya analisis terhadap preferensi kebijakan para pembuat kebijakan. Menurutnya, pembuat kebijakan memiliki preferensi yang unik dan seringkali bervariasi di antara mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap preferensi ini sangat penting dalam memprediksi dan menjelaskan tindakan kebijakan luar negeri. Menurut Hermann (1990), faktor yang paling dominan dalam perubahan kebijakan luar negeri adalah faktor internal karena memuat

variabel kepribadian (elit) dan persepsi (masyarakat). Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi pemerintah untuk memahami adanya keterbatasan arah kebijakan negara saat ini dan membuat perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri. Secara lebih jelas, Hermann mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal sebagai berikut (Hermann, 1990):



Gambar 1. Faktor Penentu Kebijakan Luar Negeri dalam Teori Kebijakan Luar Negeri Charles Hermann

a. Faktor Internal

Hermann (1990) menguraikan setidaknya terdapat tiga variabel domestik sebagai faktor internal yang mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan luar negeri yaitu faktor elit, birokrasi, dan masyarakat. *Pertama*, faktor elit yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan idiosinkratik dimana kebijakan luar negeri ditentukan oleh faktor kepribadian atau gaya kepemimpinan dari pemimpin suatu negara. Pendekatan ini juga dikenal sebagai *elite based approach*. Oleh sebab itu, perubahan kebijakan luar negeri pada

umumnya berkaitan erat dengan karakter pemimpinnya (M. G. Hermann & Hagan, 1998). Misalnya, negara dengan pemimpin yang pragmatis cenderung memiliki corak kebijakan luar negeri yang juga pragmatis. Sebaliknya, negara dengan pemimpin yang idealis akan memiliki corak kebijakan luar negeri yang idealis juga (Hermann, 2002). *Kedua*, faktor birokrasi yang berkaitan dengan peran suatu kelompok atau institusi domestik, terutama pada level pemerintahan yang ikut serta atau memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan luar negeri. Perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi pada suatu negara seringkali bukan hanya merupakan keputusan dari pemimpin negara, tetapi turut dipengaruhi pula oleh adanya tuntutan atau pengaruh dari birokrasi. Bagi negara-negara demokratis, peran dari birokrasi cenderung besar, berbeda dengan negara dengan pemerintahan yang otoriter (C. F. Hermann, 1990). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri negara-negara demokratis seringkali juga mengakomodir preferensi atau kepentingan kelompok tertentu yang berpengaruh dalam pemerintahan (birokrasi). Kelompok-kelompok tersebut meliputi menteri dan perangkatnya, fraksi partai politik di legislatif, serta jenderal-jenderal di badan militer. *Ketiga*, faktor masyarakat yaitu terkait bagaimana peran publik atau suara masyarakat dapat berpengaruh pada pembuatan atau perubahan kebijakan luar negeri. Namun, faktor ini hanya dapat diterapkan pada

negara dengan pemerintahan yang demokratis liberal. Hal ini karena masyarakat yang mencakup masyarakat sipil, organisasi massa, kelompok kepentingan, serta media massa memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan di negara demokratis.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam teori kebijakan luar negeri Charles Hermann mengacu pada lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan menggunakan istilah *international pressure* atau tekanan internasional, Hermann mendefinisikan faktor eksternal tersebut sebagai bagaimana dinamika politik internasional turut berpengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri di suatu negara. Lingkungan internasional yang dimaksud mengacu pada keadaan politik, keadaan ekonomi, serta keamanan global. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian atau *adjustment* yang dilakukan oleh negara-negara pada kebijakan luar negerinya dalam menghadapi dinamika internasional tersebut. Salah satu dinamika internasional yang paling berpengaruh adalah terkait hubungan suatu negara dengan negara-negara kuat atau *superpower*. Hal ini karena negara-negara adidaya seringkali memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat membuat negara-negara yang lebih lemah atau *lesser powers* untuk menaati atau mengubah kebijakan luar negerinya. Adanya sanksi ekonomi yang seringkali dijadikan sebagai ancaman oleh negara adidaya menjadi faktor yang

memperkuat paksaan tersebut sehingga negara-negara yang lebih lemah kemudian mengubah kebijakannya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Supaya dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif, mula-mula peneliti akan menjelaskan mengenai variabel-variabel penelitian yang dapat diukur. Pada bagian operasionalisasi konsep ini, peneliti memaparkan definisi konsep yang akan dianalisis menggunakan hasil penelitian terdahulu serta pendapat ahli sesuai bidangnya. Konsep ini akan menjadi acuan dan pendukung data sekunder yang sebelumnya telah diolah berdasarkan kerangka teoritis sebagai instrumen analisis serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Konsep Demokratisasi

Demokratisasi adalah proses di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan di dalam suatu negara atau masyarakat diperluas, diberikan kepada rakyat, dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Demokratisasi menurut Samuel P. Huntington (1991) adalah perubahan dari rezim otoriter menjadi rezim yang demokratis, di mana pemerintahan yang kuat digantikan oleh sistem pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan hukum. Menurut Huntington, demokratisasi melibatkan adanya perubahan struktural yang meliputi transisi politik, pembentukan lembaga-lembaga demokratis, serta perubahan dalam nilai dan budaya politik di suatu masyarakat (Huntington, 1991). Menurut

Robert Dahl, demokratisasi dapat terjadi ketika ada peningkatan dalam akses individu terhadap partisipasi politik, kebebasan berbicara, perlindungan hak asasi manusia, serta kemudahan akses terhadap informasi secara lebih luas. Menurut Dahl kompetisi politik yang bebas menjadi suatu hal yang penting dalam berlangsungnya proses demokratisasi suatu negara (Dahl, 1971). Sedangkan menurut Fareed Zakaria (1997), bukan hanya keberadaan lembaga-lembaga demokrasi dan pemilu yang mempengaruhi proses demokratisasi. Adanya perlindungan terhadap hak-hak terbatas individu dan pemerintahan juga turut berpengaruh. Menurut Zakaria (1997), demokratisasi yang berkualitas membutuhkan keberadaan supremasi aturan hukum, perlindungan hak minoritas, serta adanya penghormatan terhadap kebebasan masyarakat sipil (Zakaria, 1997).

1.6.1.2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah gagasan tentang kepentingan utama suatu negara atau bangsa dalam konteks hubungan internasional. Konsep ini melibatkan identifikasi dan perlindungan kepentingan-kepentingan kunci suatu negara, baik dalam hal politik, ekonomi, keamanan, maupun kebijakan luar negeri. Menurut Morgenthau dalam pandangan realisme kepentingan nasional adalah faktor sentral yang mendorong negara

untuk bertindak. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional mencakup keamanan, kelangsungan hidup negara, dan kekuatan relatif (Morgenthau, 1978). Penjelasan lain mengenai kepentingan nasional menurut Alexander Wendt adalah bahwa kepentingan nasional tidak bersifat objektif, tetapi dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan interaksi antar aktor. Menurut Wendt, kepentingan nasional merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan pembentukan identitas, norma, dan persepsi yang saling dipengaruhi (Wendt, 2012). Pentingnya kepentingan nasional dalam konteks perubahan global serta konflik budaya dikemukakan oleh Samuel Huntington. Menurut Huntington, identitas dan kepentingan nasional dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik dalam dunia yang semakin terhubung. Huntington menyoroti pentingnya memahami kepentingan nasional sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan interaksi antara negara-negara (Huntington, 1996).

Kepentingan nasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bidangnya. Secara umum, kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah suatu bangsa, kemerdekaan dan kelangsungan hidup nasional, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Cmcbinus, 2023).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Konsep Demokratisasi

Dalam kaitannya dengan perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan, demokratisasi berperan dalam proses transformasi pemerintahan domestik yang mempengaruhi pembuatan, tujuan, serta pelaksanaan kebijakan luar negeri Taiwan. Adanya proses demokratisasi politik domestik di Taiwan ini menjadi faktor internal dari perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward*. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep demokratisasi sebagai pisau analisis faktor internal yang mendorong perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward*.

1.6.2.2. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam penelitian ini, penggunaan konsep kepentingan nasional berkaitan dengan faktor eksternal. Hal ini karena Taiwan memiliki kepentingan nasional berupa faktor ekonomi yang perlu diakomodir melalui kebijakan luar negerinya. Pemerintah Taiwan menyadari bahwa jika hanya mengandalkan diplomasi politik maka Taiwan tidak dapat melepaskan diri dari isolasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan kemampuan ekonomi Taiwan sebagai sarana diplomasi. Kebijakan luar negeri Taiwan dan kaitannya dengan kepentingan nasional di bidang

ekonomi dapat dilihat dalam kerjasama Taiwan dan berbagai negara di kawasan Asia.

1.7. Argumen Penelitian

Perubahan kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward* tahun 2016 hingga 2023 terjadi karena adanya faktor eksternal yang berkaitan dengan bagaimana dinamika politik internasional turut berpengaruh pada perubahan kebijakan luar negeri di suatu negara. Dalam hal ini faktor eksternal tersebut adalah berupa tekanan internasional. Selain itu, perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok juga turut dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi hal-hal yang bersifat domestik berupa adanya demokratisasi.

1.8. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan apa saja faktor yang mendorong perubahan orientasi kebijakan luar Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward*.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang berusaha menguraikan faktor-faktor pendorong perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan terhadap Tiongkok dari *Pro China* ke *New Southward* melalui teori kebijakan luar negeri Charles Hermann dengan menggunakan variabel-variabel terkait sebagai instrumen.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Pemilihan situs penelitian menjadi penting karena berkaitan dengan kredibilitas dan relevansi data dari subjek penelitian. Situs penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Taiwan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek utama dari penelitian ini adalah pemerintah Taiwan sebagai pembuat kebijakan luar negeri. Kemudian subjek lain dari penelitian ini adalah masyarakat Taiwan dan internasional yang turut berpengaruh dalam mendorong perubahan kebijakan luar negeri Taiwan.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kalimat, kata, maupun frasa yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih oleh penulis. Terdapat dua jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer dan sekunder.

1.8.5. Sumber Data

Penulis menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari internet, yaitu dari beberapa situs kredibel seperti laman resmi pemerintah Taiwan, buku, jurnal, artikel, dan beberapa situs lain yang relevan dengan penelitian penulis. Data-data yang telah didapatkan kemudian akan diolah menggunakan studi literatur dan studi kepustakaan oleh penulis.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan data yang bersumber dari literatur perpustakaan dan internet dalam jaringan sebagai sarana.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis akan menggunakan metode kongruen. Metode kongruen merupakan metode yang berfokus pada logika sebab-akibat yang terdapat teori yang dipilih oleh penulis dalam menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Penulis akan mengumpulkan data yang kredibel melalui studi kepustakaan dan dari laman internet. Selanjutnya, penulis akan mengerucutkan lingkup penelitian sehingga lebih fokus pada perubahan orientasi kebijakan luar negeri Taiwan dari *Pro China* ke *New Southward* serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung pelaksanaan proses penelitian. Yang terakhir, penulis akan membangun kerangka pemikiran logis untuk mengurutkan dan menyusun data-data yang telah didapatkan.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan berkualitas. Hal ini dapat dibuktikan melalui pencantuman referensi dengan sumber kredibel seperti laman resmi pemerintah Taiwan (english.president.gov.tw) dan beberapa sumber lain yang terkait.